



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jendral Sudirman 460 Pekanbaru - Telp. (0761) 45505, Fax. 45507
www.riau.go.id



LAPORAN KINERJA 2016

www.diskominfo.riau.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Riau dan Rencana Strategis Diskominfo Provinsi Riau. Diharapkan nantinya LKj ini dapat memberikan informasi kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau selama Tahun 2016 guna memberikan rekomendasi yang tepat dalam rangka memicu perubahan atau perbaikan kinerja yang diperlukan dan usulan penganggaran periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Pekanbaru, Desember 2016

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Riau,



H. H. YOGI GETRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199303 1 002

DAFTAR ISI

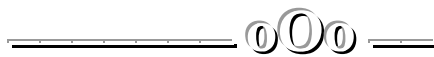
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Riau.....	2
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis.....	6
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja SKPD.....	17
B. Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

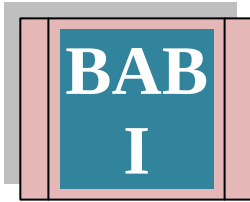
Pengukuran kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau tahun 2016 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/09/M.PAN/5/2007 serta PERMENPAN No.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, juga dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa dari sasaran strategis ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi*** untuk nilai e-government capaian **0%** ini disebabkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI meniadakan kegiatan Pemeringkatan E-Government bagi tingkat Provinsi pada tahun 2016. Sedangkan nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 3,561 dari yang sebelumnya nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau tahun 2015 adalah 30,569 meningkat pada tahun 2016 menjadi 34,13.

Adanya keberhasilan ini disadari tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan/*stake holders* (Kepala Daerah dan unsur pimpinan di daerah, dinas/instansi terkait), dan masyarakat di Propinsi Riau termasuk tentunya seluruh komponen internal di Diskominfo Provinsi Riau.



DISKOMINFO RIAU



PENDAHULUAN

A. Umum

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang menjadi tuntunan dan tidak mungkin lagi ditolak. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan besar dalam membangun *good governance* dan merupakan salah satu faktor utama pendorong pembangunan ekonomi. TIK juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge society*) ke depan.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dengan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab tersebut akan menuangkan hasil pelaksanaan kebijakan dan program Tahun Anggaran 2016 dalam Laporan Kinerja yang mencerminkan tugas pokok dan fungsinya.

Maksud dari penyusunan LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau tahun 2016 adalah sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019, khususnya Perjanjian Kinerja tahun 2016. Sedangkan tujuannya adalah sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau di masa yang akan datang.

B. Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Riau

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang disertai wewenang tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informasi.

Urusan Komunikasi dan Informatika adalah urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

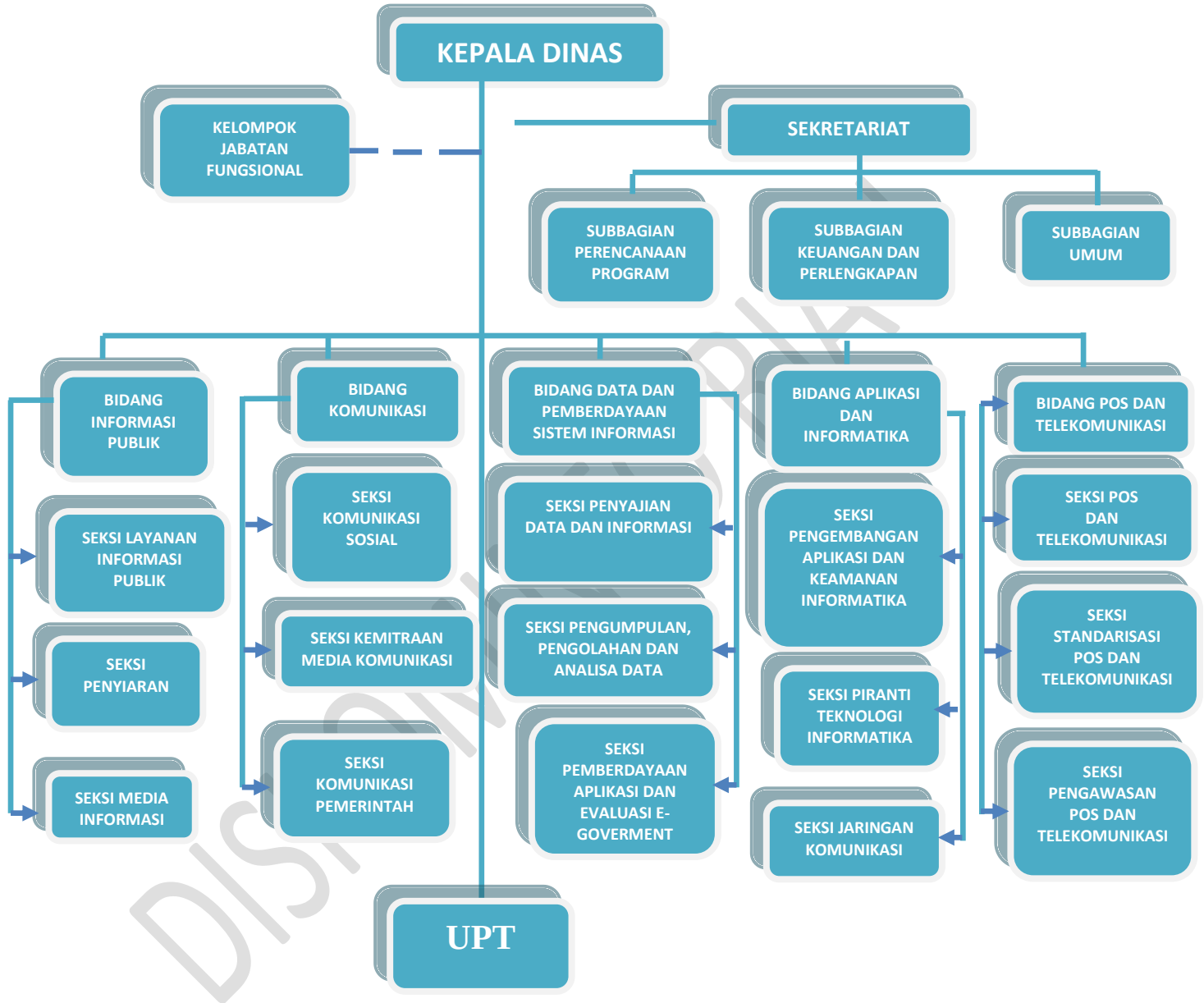
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Sedangkan untuk Unit Pelaksana teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau terdiri atas :

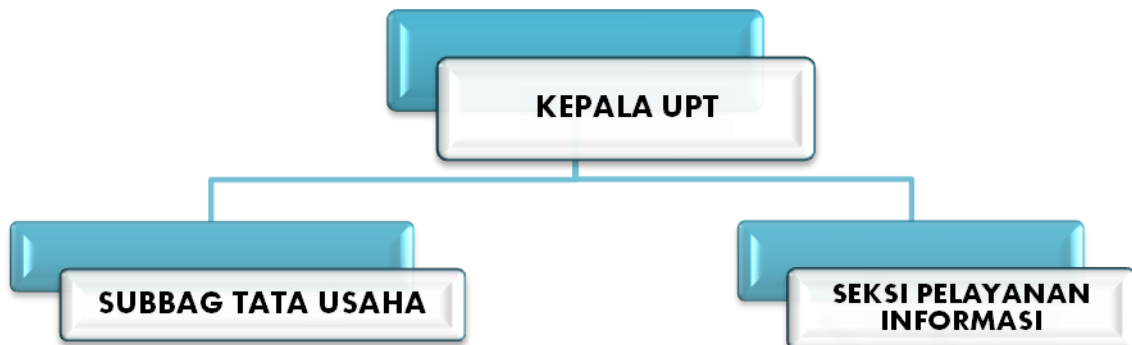
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Informasi Publik
- d. Bidang Komunikasi
- e. Bidang Data dan Pemberdayaan Sistem Informasi
- f. Bidang Aplikasi dan Informatika
- g. Bidang Pos dan Telekomunikasi
- h. Unit Pelaksana Teknis Media Center
- i. Unit Pelaksana Teknis Komisi Informasi Provinsi Riau

BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI

RIAU SESUAI PERDA NO. 2 TAHUN 2014



UPT MEDIA CENTER



UPT KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU



BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2014-2019 merupakan pedoman/landasan serta arah pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Riau selama lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Riau 2014 – 2019 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya Rencana Strategis 2014 – 2019 diperoleh rencana tindakan dan kegiatan yang terpadu, sinkron dan bersinergi dalam melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dibuat.

VISI DAN MISI DINAS KOMINFO PROVINSI RIAU 2014 – 2019

VISI PROVINSI RIAU

“Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pemanfaatan Aparatur”

VISI

Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika Yang Handal Dan Berdaya Saing

MISI

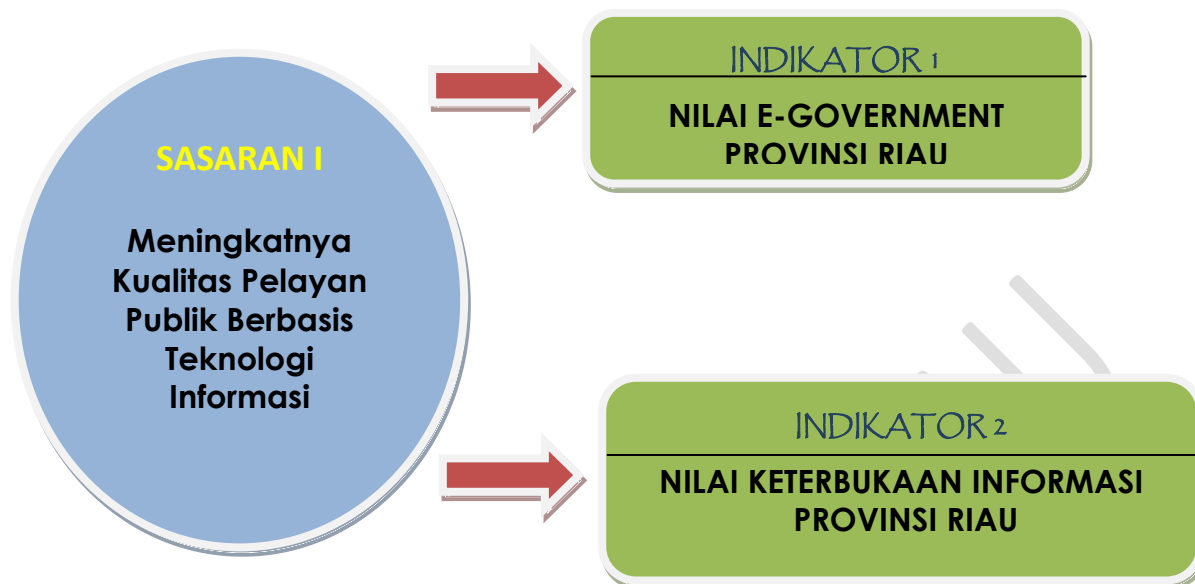
Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien, professional, transparan dan akuntabel;

TUJUAN

Terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi

SASARAN

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan internal SKPD



Untuk mengukur keberhasilan sasaran I, diperlukan alat ukur / indikator untuk mengukur sejauh mana sasaran tersebut tercapai,

Indikator 1 sasaran I adalah : **Nilai e-Government Provinsi Riau** yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan e-government yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada Lembaga Pemerintah yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terintegrasi dalam memberikan layanan publik. Kategori yang dinilai adalah aspek Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan TIK.

Nilai e-Government Provinsi Riau

Sub indikator

- Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpasang
- Jumlah SKPD yang menerapkan e-Government secara terintegrasi, aman dan handal

5 Dimensi Penilaian E-Government :

1. Kebijakan
2. Kelembagaan
3. Infrastruktur
4. Aplikasi
5. Perencanaan

Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia :

a) Kebijakan

Dimensi kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen resmi yang memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK, terdiri dari:

- Manajemen/proses kebijakan (terkait TIK) yang dilaksanakan.
- Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya.
- Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, atau bentuk dokumen resmi lainnya.
- Standar atau panduan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum maupun secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu.
- Peraturan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan program pengembangan dan pemanfaatan TIK.
- Keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan TIK.
- Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan.
- Evaluasi/manajemen risiko TIK yang diterapkan.

b) Kelembagaan

Dimensi kelembagaan terkait erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan indikator:

- Keberadaan organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi *Chief Information Officer (CIO)*, dukungan teknis, dan fungsi lain dengan baik.
- Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).
- Adanya Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- Adanya kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.
- Adanya program pengembangan Sumber Daya Manusia TIK yang terencana dan terlaksana.

c) Infrastruktur

Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari:

- *Data center* dan aplikasi pendukungnya.

- Jaringan Data (LAN, WAN, Internet).
- Keamanan yang terencana dan terevaluasi.
- Fasilitas pendukung seperti antara lain AC, UPS, Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.
- Dokumen *Disaster Recovery* yang diperlukan jika terjadi kegagalan sistem.
- Pemeliharaan infrastruktur TIK.
- Inventarisasi peralatan TIK.

d) Aplikasi

Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria antara lain:

- Adanya situs web (*homepage*).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan Publik).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi & Manajemen Umum).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 3 (Administrasi Legislasi).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 4 (Manajemen Pembangunan).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 5 (Manajemen Keuangan).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 6 (Manajemen Kepegawaian).
- Dokumentasi setiap aplikasi yang dimiliki.
- Inventarisasi seluruh aplikasi TIK.
- Interoperabilitas setiap aplikasi yang diterapkan.

Aplikasi tersebut haruslah mendukung fungsi dasar umum sistem pemerintahan yang terdiri dari antara lain:

- Pelayanan publik, seperti kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan, dan lain-lain.
- Administrasi dan manajemen umum yang meliputi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain.
- Administrasi legislasi yang meliputi aplikasi sistem katalog hukum, peraturan perundangan, dan lain-lain.
- Manajemen pembangunan yang meliputi sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan, sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Manajemen keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain.
- Manajemen kepegawaian yang meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.

e) Perencanaan

Dimensi perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan dengan indikator antara lain:

- Adanya organisasi yang melakukan perencanaan TIK
- Adanya sistem perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata
- Adanya dokumentasi *Master Plan* yang lengkap, yang mengandung unsur lima dimensi PeGI, Implementasi dari *Master Plan* yang sudah dibuat
- Adanya anggaran yang tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD.

Indikator ke 2 sasaran I adalah : **Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau** yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire) ke seluruh Badan Publik.

**Nilai Keterbukaan
Informasi Publik
Provinsi Riau**

Sub indikator

- Persentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau pada SDDKD
- Jumlah pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau
- Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan internet yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau

Tahapan Penilaian:

- Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire)
- Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung
- Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan tahun ketiga Renstra Dinas Kominfo Provinsi Riau 2014 – 2019. Perjanjian kinerja Dinas Kominfo Provinsi Riau terlampir pada lampiran-4. Untuk mewujudkan kinerja Dinas Kominfo Provinsi Riau Tahun 2016 didukung dengan anggaran Rp. 43.521.477.924,- dengan rincian sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	37.644.936.624,-
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal SKPD	5.876.541.300,-
	JUMLAH	43.521.477.924,-



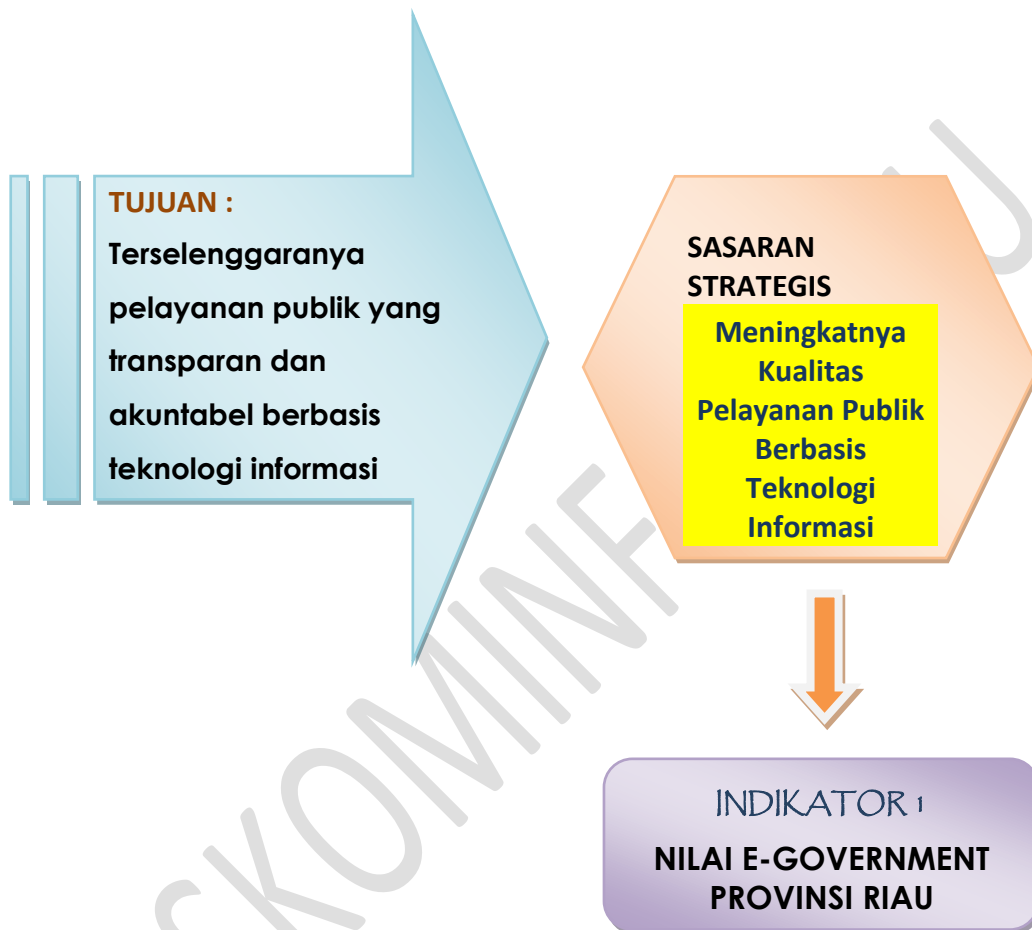
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMINFO RIAU

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Disamping itu, sesuai dengan PERMENPAN No.PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN No.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi ditampilkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaannya.



Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, indikator kinerjanya yang pertama adalah **nilai e-government Provinsi Riau**.

Gambaran capaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Berbasis Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai e-government Provinsi Riau	2.6	0	0%

Penilaian rutin dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI setiap tahunnya, namun pada **tahun 2016 PEMERINGKATAN e-GOVERNMENT TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN KOMINFO RI, karena pada tahun 2016 Kementerian Kominfo fokus pada Program 1 Juta Domain.**

Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan nilai e-government Provinsi Riau. Berikut rangkuman upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penilaian 5 dimensi e-government :

1) Kebijakan

- Membuat Perda tentang Sistem Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan (Perda No. 6 tahun 2015)
- Membuat Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan aplikasi perkantoran secara elektronik (e-office) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

2) Kelembagaan

- Perekrutan Tenaga IT yang disebar di SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Adanya SOP tentang TIK, yaitu :
 - SOP surat masuk dan keluar secara elektronik (e-office)
 - SOP pembuatan SPT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas secara elektronik (e-office)
 - SOP pengajuan hak akses aplikasi
 - SOP pelaksanaan pendampingan pembuatan aplikasi
 - SOP Pengembangan Perangkat Lunak
 - SOP Pengelolaan website (riau.go.id)
 - SOP Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Riau
 - SOP Pemeliharaan Jaringan Pemerintah Provinsi Riau

3) Infrastruktur

- Penyediaan bandwidth 500 mbps yang dialokasikan untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Pembuatan command center Provinsi Riau
- Pembelian 200 unit PC yang didistribusikan untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Melakukan interoperabilitas aplikasi menggunakan MANTRA.

Proses penggunaan aplikasi MANTRA yang dikembangkan oleh Kemenkominfo yang akan diintegrasikan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

- Pemasangan jaringan internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

4) Aplikasi

- Menyediakan Situs web (home page) dan saluran interaksi lainnya, melalui TV Streaming, Radio Streaming, Informasi Publish melalui Video Throne, serta Media Center yang berlokasi di Perpustakaan Soeman HS dan Dinas Kominfo Provinsi Riau

5) Perencanaan

- Membuat Master Plan TIK Provinsi Riau

Walaupun begitu, untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, berikut beberapa sub indikator sebagai alat ukurnya :

SUB INDIKATOR NILAI E-GOVERNMENT

NO.	SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpasang	jaringan	51	51	100%
2.	Jumlah SKPD yang menerapkan e-government secara terintegrasi, aman dan handal	SKPD	35	43	122,8%

Rincian Capaian Sub Indikator selengkapnya sebagai berikut :

1) Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpasang

Target : 51 jaringan

Realisasi : 51 jaringan

Berikut Daftar Jaringan layanan komunikasi dan informatika yang dipasang oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau :

DAFTAR AKTIVASI BANDWITH SKPD DISKOMINFO RIAU

No	NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO	AKTIFASI	BANDWITH	BERITA ACARA	KET
BIRO					
1	Biro Administrasi Pemerintahan Umum	SUDAH AKTIF	10	OK	
2	Biro Hukum dan HAM	SUDAH AKTIF	10	OK	
3	Biro Hubungan Masyarakat	SUDAH AKTIF	50	OK	
	Biro Administrasi Pembangunan	SUDAH AKTIF	TIDAK ADA PERANGKAT		
4	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	SUDAH AKTIF	20	OK	
5	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	SUDAH AKTIF	10	OK	
6	Biro Umum	SUDAH AKTIF	50	OK	
7	Biro Administrasi Kemasyarakatan	SUDAH AKTIF	10	OK	
	Biro Organisasi	SUDAH AKTIF	TIDAK ADA PERANGKAT		
DINAS					
8	Dinas Bina Marga	SUDAH AKTIF	10	OK	
9	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan SDA	SUDAH AKTIF	10	OK	
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	SUDAH AKTIF	78	OK	
11	Dinas Kehutanan	SUDAH AKTIF	10	OK	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	TOLAK (menyediakan sendiri)		

No	NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO	AKTIFASI	BANDWITH	BERITA ACARA	KET
12	Dinas Kesehatan	SUDAH AKTIF	5	OK	
13	Dinas Perhubungan	SUDAH AKTIF	10	OK	
14	Dinas Perkebunan	SUDAH AKTIF	5	OK	
	Dinas Pendapatan	-	TOLAK (menyediakan sendiri)		
15	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral	SUDAH AKTIF	5	OK	
16	Dinas Sosial	SUDAH AKTIF	5	OK	
17	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	SUDAH AKTIF	5	OK	
18	Dinas Pertanian dan Peternakan	SUDAH AKTIF	10	OK	
19	Dinas Perikanan dan Kelautan	SUDAH AKTIF	5	OK	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	SUDAH AKTIF	15	OK	
21	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	5	OK	
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SUDAH AKTIF	5	OK	
23	Dinas Koperasi	SUDAH AKTIF	5	OK	
BADAN					
24	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	SUDAH AKTIF	10	OK	
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SUDAH AKTIF	10	OK	
26	Badan Kep. Pendidikan dan Pelatihan Daerah	SUDAH AKTIF	20	OK	
	Badan Lingkungan Hidup	-	RUSAK		
27	Badan Pemb. Perempuan Perlindungan Anak dan KB	SUDAH AKTIF	5	OK	
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	SUDAH AKTIF	10	OK	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	TIDAK ADA JARINGAN		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	TOLAK (menyediakan sendiri)		
29	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	SUDAH AKTIF	10	OK	
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SUDAH AKTIF	20	OK	
31	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	SUDAH AKTIF	20	OK	
32	Badan Penelitian dan Pengembangan	SUDAH AKTIF	5	OK	

No	NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO	AKTIFASI	BANDWITH	BERITA ACARA	KET
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa	SUDAH AKTIF	10	OK	
	Badan Ketahanan Pangan	-	TIDAK ADA JARINGAN		
	Badan Penghubung	-	TIDAK ADA JARINGAN		
SKPD LAINYA					
34	Inspektorat	SUDAH AKTIF	5	OK	
	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	-	RUSAK		
35	RSUD Arifin Achmad	SUDAH AKTIF	10	OK	
36	Satpol PP (5 Mb)	SUDAH AKTIF	5	OK	
37	RSJ Tampan	SUDAH AKTIF	10	OK	
	RSUD Petala Bumi	-	TIDAK ADA JARINGAN		
	Sekretariat DPRD	-	TIDAK ADA JARINGAN		
38	Sekretariat Korpri	SUDAH AKTIF	2	OK	
LAINNYA					
39	GEDUNG DAERAH	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
40	KOMISI INFORMASI PROVINSI	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
41	RUMAH PLT GUBERNUR SINGAMANGARAJA	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
42	GEDUNG DARMA WANITA	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
43	RUANG RAPAT PARIPURNA	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
44	RUANG GUBERNUR	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
45	RUANG WAGUB	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
46	RUANG SEKRETARIS DAERAH	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
47	RUANG MELATI	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
48	RUANG KENANGA	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
49	RUANG VIDEO CONFERENCE	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
ASSISTEN					
50	ASISTEN PEM. & KESEJAHTERAAN RAKYAT	SUDAH AKTIF	BIRO UMUM		
	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMB.	SUDAH AKTIF	BIRO UMUM		
	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SUDAH AKTIF	BIRO UMUM		

No	NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO	AKTIFASI	BANDWITH	BERITA ACARA	KET
STAFF AHLI					
51	STAFF AHLI BIDANG HUKUM DAN HAM	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
	STAFF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
	STAFF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
	STAFF AHLI BIDANG EKO DAN KEUANGAN	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
	STAFF AHLI BIDANG KEMAS. DAN SDM	SUDAH AKTIF	DISKOMINFO		
JUMLAH BANDWIDTH			500		

2) Jumlah SKPD yang menerapkan e-government secara terintegrasi, aman dan handal

Target : 35 SKPD

Realisasi : 43 SKPD

Dalam hal ini kriteria SKPD yang telah menerapkan e-government adalah SKPD yang telah menjalankan aplikasi e-office baik itu surat masuk saja atau surat keluar saja atau pun sudah menjalankan keduanya (surat masuk dan keluar).

Berikut beberapa SKPD tersebut :

NO.	NAMA SKPD	KETERANGAN
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau	sudah sepenuhnya memanfaatkan penggunaan e-office dalam proses surat masuk dan keluar
2	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Riau	sudah menggunakan e-office untuk surat masuk dan keluar, namun semua masih dijalankan oleh tenaga IT, belum semua pegawai menggunakan e-office
3	Dinas Sosial Provinsi Riau	sudah menggunakan e-office untuk surat masuk dan keluar, namun semua masih dijalankan oleh tenaga IT, belum semua pegawai menggunakan e-office
4	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau	sudah menggunakan e-office untuk surat masuk dan didistribusikan sampai ke sasaran/ mendisposisikan sampai ke staf, untuk surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
5	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	sudah menggunakan e-office untuk surat masuk dan didistribusikan sampai ke sasaran/ mendisposisikan sampai ke staf, untuk surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau	sudah menggunakan e-office untuk surat masuk dan didistribusikan sampai ke sasaran/ mendisposisikan sampai ke staf, untuk surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office

NO.	NAMA SKPD	KETERANGAN
7	Biro Umum Setda Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
8	Biro Organisasi Setda Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
9	Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
10	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office

NO.	NAMA SKPD	KETERANGAN
11	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
12	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Sedangkan untuk surat keluar belum menggunakan e-office (masih konvensional).
13	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
14	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office

NO.	NAMA SKPD	KETERANGAN
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
16	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
17	RSJ Tampan Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
18	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office

NO.	NAMA SKPD	KETERANGAN
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
20	Dinas Pendapatan Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
21	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu ess II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office

NO.	NAMA SKPD	KETERANGAN
23	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Riau	Surat masuk sudah diterima melalui admin kantor, lalu eselon II mendisposisikan secara konvensional/manual ke bawahan tidak menggunakan e-Office. Dan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
24	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan e-Office. Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
25	Badan Penghubung Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan e-Office. Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan e-Office. Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office

NO.	NAMA SKPD	KETERANGAN
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
28	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa Prov. Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
29	Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
30	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office

NO.	NAMA SKPD	KETERANGAN
31	Dinas Kehutanan Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
32	Dinas Bina Marga Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
33	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan SDA Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
34	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
35	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office

NO.	NAMA SKPD	KETERANGAN
36	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
37	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
38	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
39	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
40	Satpol PP Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office

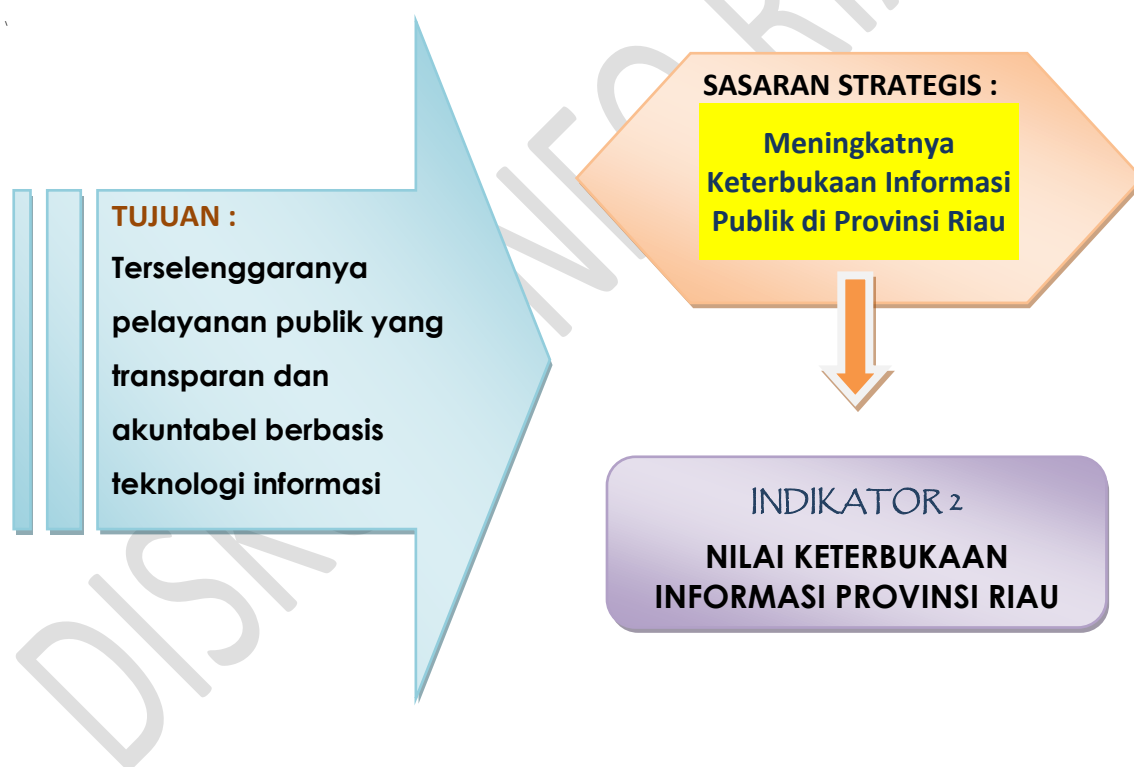
NO.	NAMA SKPD	KETERANGAN
41	DPRD Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
42	RSUD Petala Bumi Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office
43	Inspektorat Provinsi Riau	surat masuk hanya sampai admin kantor lalu admin kantor mencetak surat manual ke eselon II dan eselon II tidak menggunakan <i>e-Office</i> . Sedangkan surat keluar proses dari awal pembuatan surat sampai disetujui kepala kantor masih manual, lalu pendistribusian melalui e-office

Berikut 8 SKPD yang belum menggunakan aplikasi e-office sama sekali :

1. Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Riau
2. Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi Riau
3. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Riau
4. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Riau
5. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau
6. Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Provinsi Riau
7. Sekretariat Korpri
8. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Alasan belum digunakannya e-office pada 8 SKPD ini adalah karena kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan e-office pada SKPD tersebut, dan dari 80 tenaga ahli IT yang direkrut tidak mencukupi untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Namun mulai tahun 2017 di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau menyusutnya jumlah SKPD sebagai akibat adanya penggabungan dari beberapa SKPD sehingga jumlah tenaga IT yang ada mencukupi untuk semua SKPD.



Dengan meningkatnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, indikator kinerjanya yang kedua adalah ***Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau.***

Gambaran capaian sasaran **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Riau** adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau	42,91	34,130	79,54 %

Penilaian dilakukan oleh tim dari Komisi Informasi Pusat dalam kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Kegiatan ini secara keseluruhan berlangsung dari bulan April sampai dengan Desember 2016.

ALUR PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Alur pemeringkatan keterbukaan informasi publik terdiri atas 2 term :

A. Term I

1) Pengiriman SAQ (Self Assessment Questionnaire)

- Tim penilai KIP (Keterbukaan Informasi Publik) mengirimkan SAQ dalam bentuk softfile melalui email dan/atau SAQ dalam bentuk hardfile melalui alamat Badan Publik dan dapat diunduh pada situs Komisi Informasi Pusat (www.komisiinformasi.go.id). Pengiriman SAQ kepada 398 Badan Publik yang dilakukan pada bulan April 2016.
- Pengembalian SAQ dari Badan Publik kepada Tim Penilai KIP dalam bentuk softfile (CD/Flashdisk) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Email ke kpmkip2016@komisiinformasi.go.id dengan subyek email (KPMKIP2016_BadanPublik, contoh : KPMKIP2016_Komisi Informasi Pusat)
 - Antar langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat Gedung Graha PPI Lantai 5, Jalan Abdul Muis Nomor 8, Jakarta Pusat. Telp : 021 – 38430741, Faks : 021 – 38430757
 - Jasa Kiriman

2) Verifikasi SAQ (Self Assessment Questionnaire)

- SAQ yang telah diisi dan dikembalikan oleh Badan Publik akan menghasilkan **nilai pertama**.
- SAQ akan diverifikasi oleh Tim Penilai KIP untuk menghasilkan **nilai kedua**. Verifikasi dilakukan melalui :
 - Situs/portal yang tercantum dalam kolom “Keterangan Data Dukung” SAQ
 - Data dukung yang dikirimkan bersamaan dengan SAQ

3) Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)

Setelah dilakukan verifikasi SAQ maka akan dilanjutkan ke tahap VLA oleh Tim Penilai KIP dengan cara melakukan verifikasi mendalam dengan meminta data dukung atas pernyataan tertentu dalam SAQ kepada Badan Publik dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Tim Penilai KIP. Pertanyaan dikirim melalui email (tertulis) kepada responden Badan Publik yang mengisi SAQ. VLA akan dilaksanakan pada bulan Mei 2016. Hasil VLA menjadi **nilai ketiga** bagi Badan Publik.

Nilai pertama, kedua dan ketiga adalah tahapan Term I yang menjadi bahan Pra Evaluasi untuk diberikan oleh Tim Penilai KIP kepada Badan Publik. Hasil Pra Evaluasi merupakan tolak ukur awal bagi Badan Publik untuk dapat ditingkatkan pada Term II. Hasil pemeringkatan akan ditentukan berdasarkan nilai pada Term II

B. Term II

Alur kegiatan a, b dan c pada Term I dilakukan kembali pada Term II setelah mendapat Pra Evaluasi dari Tim Penilai KIP dengan ketentuan :

- 1) Badan Publik kembali mengisi dan mengirimkan SAQ dengan menggunakan lembar SAQ yang sama pada Term I.
- 2) Pengisian SAQ dilakukan dengan memperhatikan tolak ukur hasil Pra Evaluasi Term I
- 3) Alur kegiatan B (Verifikasi SAQ) akan menghasilkan 20 Badan publik pada setiap kategori dengan nilai tertinggi untuk masuk pada alur kegiatan C (Verifikasi Lanjutan Acak)
- 4) Alur kegiatan C (Verifikasi Lanjutan Acak) akan menghasilkan 10 Badan Publik pada setiap kategori dengan nilai tertinggi untuk masuk pada alur kegiatan D (Visitasi)

5) Visitasi

Visitasi merupakan tahap akhir untuk menghasilkan peringkat 10 besar Badan Publik pada setiap kategori. Visitasi dilakukan untuk mengukur 5 KO (Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Konsisten) Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Badan Publik melalui presentasi.

PENEKANAN PENILAIAN

Dengan memperhatikan telah diberlakukannya UU KIP selama 6 tahun, maka untuk tahun ini indikator Keterbukaan Informasi pada Badan Publik lebih ditekankan pada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik sebagai jaminan hak masyarakat atas Informasi Publik.

PRESENTASE BOBOT NILAI

A. Untuk bobot nilai pada setiap alur kegiatan, sebagai berikut :

- 1) Verifikasi SAQ, berbobot 30%
- 2) Verifikasi Lanjutan Acak, berbobot 30%
- 3) Visitasi, berbobot 40%

B. Untuk bobot nilai pada masing-masing indikator dalam SAQ, sebagai berikut :

- 1) Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%
- 2) Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%
- 3) Pelayanan Informasi publik berbobot 25%
- 4) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%

KUALIFIKASI PENILAIAN

Hasil akhir dari pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik berupa kualifikasi yang terdiri atas :

- a. Informatif (I) dengan nilai 97 – 100;
- b. Menuju Informatif (MI) dengan nilai 80 – 96;

- c. Cukup Informatif (CI) dengan nilai 60 – 79;
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40 – 59; dan
- e. Tidak Informatif dengan nilai <39.

PENGUKURAN NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PROVINSI RIAU TAHUN 2016 :

- **Tahap Pengiriman/Pengisian Kuesioner**

Kuesioner yang telah diisi oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau terdapat pada lampiran-5.

Kuesioner yang telah diisi telah dikirimkan kembali ke Komisi Informasi Pusat melalui email.

- **Tahap Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung**

Kuesioner yang telah diterima oleh KI Pusat, dinilai dengan memverifikasi kuesioner tersebut melalui media situs/portal dan soft file data dukung yang telah dilampirkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau. Sampai pada tahap ini Dinas Kominfo mendapat nilai 35,1.

- **Tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)**

Karena kurangnya koordinasi antara Dinas Kominfo Provinsi Riau dan KI Pusat, Provinsi Riau gagal mengikuti tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA).

- **Tahap Visitasi Badan Publik**

Pada tahap visitasi Dinas Kominfo Provinsi Riau mendapatkan nilai 59.

Hasil penilaian :

TAHAPAN	BOBOT	NILAI	JUMLAH
Self Assessment Questioner (SAQ) dan Verifikasi Website serta Softfile Data Dukung	30%	35,1	10,53
Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)	30%	0	0
Visitasi Badan Publik	40%	59	23,6
TOTAL (NILAI AKHIR)			34,13
KATEGORI : TIDAK INFORMATIF			

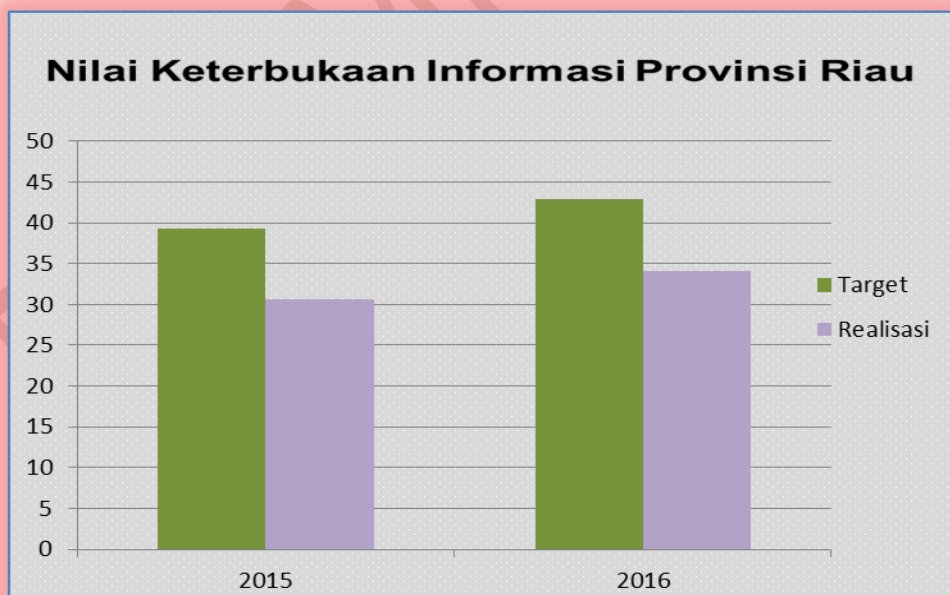
Hasil Pemeringkatan Kategori Badan Publik Provinsi tahun 2015 secara keseluruhan (10 besar) :

Peringkat	Provinsi	Nilai Keterbukaan Informasi	Kategori
I	Jawa Timur	94,24	Menuju Informatif
II	Aceh	90,24	Menuju Informatif
III	Kalimantan Timur	88,17	Menuju Informatif
IV	Banten	88,08	Menuju Informatif
V	Sumatera Selatan	87,34	Menuju Informatif
VI	DKI Jakarta	86,73	Menuju Informatif
VII	Kalimantan Barat	84,77	Menuju Informatif
VIII	Jawa Tengah	84,00	Menuju Informatif
IX	Nusa Tenggara Barat	73,54	Cukup Informatif
X	Sumatera Barat	73,05	Cukup Informatif

PERBANDINGAN NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PROVINSI RIAU TAHUN 2016
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2015)

Mulai tahun 2016 Komisi Informasi Pusat telah membakukan tata cara penilaian keterbukaan informasi Badan Publik melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi badan Publik, sehingga perbandingan nilai tahun berjalan dengan nilai tahun sebelumnya dapat disandingkan. Berikut perbandingan nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau Tahun 2016 dengan tahun 2015 :

NILAI KETERBUKAAN INFORMASI	2015	2016
Target	39,360	42,91
Realisasi	30,569	34,13
Capaian	77,67%	79,54%



Dilihat dari nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau tahun 2015 dan 2016 masih dibawah angka 39 yaitu masih klasifikasi **TIDAK INFORMATIF**. Namun secara angka, nilai keterbukaan informasi tahun 2016 mengalami peningkatan 3,561 poin dari tahun 2015.

Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan nilai keterbukaan Provinsi Riau tahun berikutnya :

- ✓ Adanya komitmen dari bidang terkait untuk mengikuti pemeringkatan (melakukan persiapan yang matang, kalau perlu dibentuk tim khusus untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan menjadi dasar penilaian)
- ✓ Memperhatikan lagi surat-surat perjanjian dengan pihak ke-3, DIP (Daftar Informasi Publik) serta ketersediaan dokumen pendukung dari peraturan perundang-undangan, keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan perlu diperhatikan lagi untuk laporan keuangan yang sudah diaudit karena ini semua adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik (Saran dari Komisi Informasi Pusat)

SUB INDIKATOR NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK :

NO.	SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Persentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau pada SDDKD	SKPD	26,19%	27,77	106%
2.	Jumlah Pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau	Orang	280.000	575.372	205%
3.	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan internet yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau	Orang	35.000	13.317	38%

Rincian selengkapnya untuk setiap sub indikator adalah sebagai berikut :

1) Persentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau pada SDDKD

Target : 26,19%

Jumlah data/tahun yang wajib diisi di SDDKD = $1.318 \times 12 \text{ kab/kota} = 15.816 \text{ data}$.

Jumlah data yang wajib diisi dari tahun 2003 s/d 2016 (14 tahun), seharusnya = $15.186 \times 14^{\text{th}} = 212.604 \text{ data}$

Target jumlah data sampai tahun 2016 = 55.680 data

Persentase target keterisian data sampai tahun 2016 =

$(55.680/212.604) \times 100\% = 26,19\%$

Realisasi : 27,77%

Realisasi jumlah keterisian data sampai tahun 2014 = 59.046 data

Persentase realisasi keterisian data sampai tahun 2016 =

$$(59.046/212.604)*100\% = 27,77\%$$

Namun angka realisasi ini bukanlah angka akhir, ini disebabkan proses updating data tahun n masih akan berlanjut sampai n+3, artinya data final tahun 2016 baru akan didapat pada akhir tahun 2019.

No.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH
1	PROVINSI RIAU	7155
2	PEKANBARU	2282
3	DUMAI	2902
4	ROKAN HULU	4026
5	INDRAGIRI HULU	2493
6	INDRAGIRI HILIR	2839
7	KUANTAN SINGINGI	5104
8	KAMPAR	3277
9	PELALAWAN	2952
10	SIAK	3113
11	BENGKALIS	3552
12	KEPULAUAN MERANTI	3451
13	ROKAN HILIR	1164
	DATA PENDUKUNG	14736
	TOTAL	59046

2) Jumlah Pengunjung website resmi dan media online yang dikelola

Diskominfo Provinsi Riau

Target : 280.000 orang

Realisasi : 575.372 orang

Jumlah tersebut berasal dari 3 website yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi

Riau yaitu :

- www.riau.go.id : 269.936
- www.diskominfo.riau.go.id : 31.885
- www.mediacenter.riau.go.id : 273.551 +
575.372 orang

*) www.riau.go.id merupakan website resmi Pemerintah Provinsi Riau yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau .

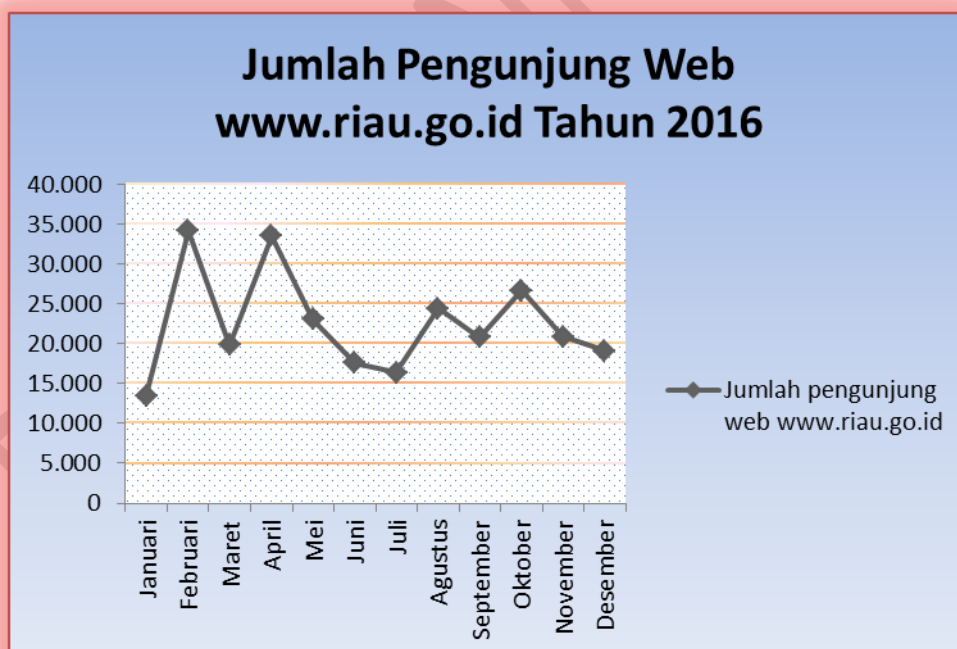
*) www.diskominfo.riau.go.id merupakan website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau

*) www.mediacenter.riau.go.id merupakan website resmi media center Dinas Komunikasi dan Informatika dan Provinsi Riau yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau

REKAPITULASI PENGUNJUNG WEBSITE TAHUN 2016

www.riau.go.id

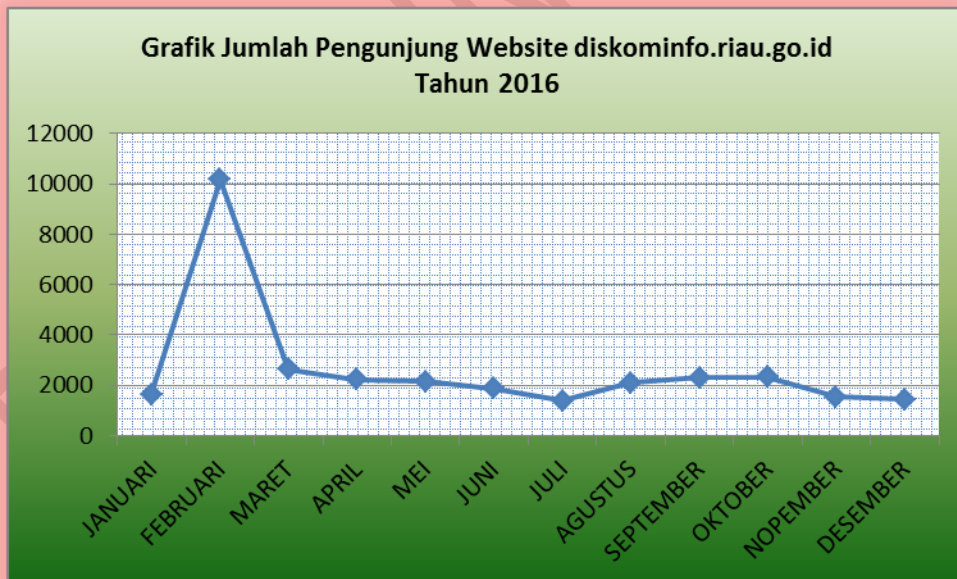
No	Bulan	Jumlah Pengunjung Web http://riau.go.id
1	Januari	13448
2	Februari	34151
3	Maret	19863
4	April	33499
5	Mei	23055
6	Juni	17562
7	Juli	16396
8	Agustus	24424
9	September	20839
10	Oktober	26717
11	Nopember	20875
12	Desember	19107
Total		269936



REKAPITULASI PENGUNJUNG WEBSITE TAHUN 2016

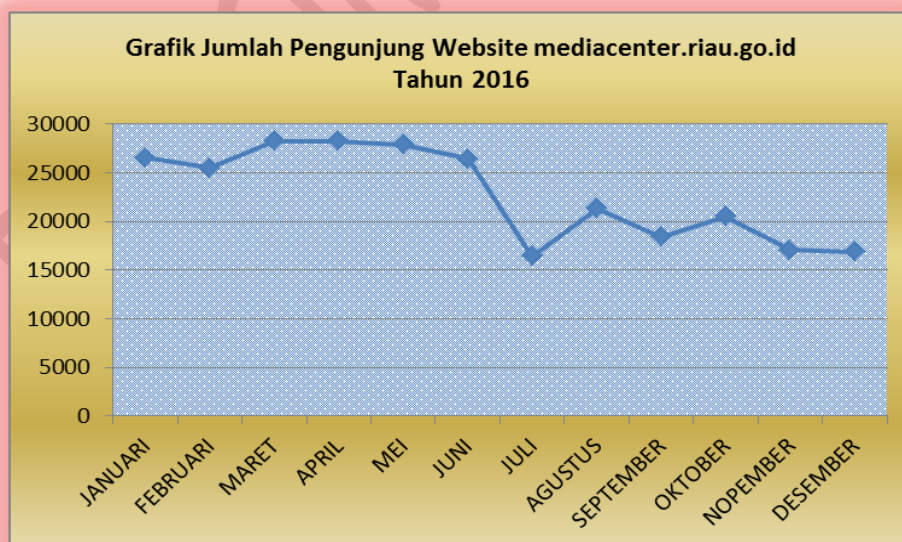
<http://diskominfo.riau.go.id>

NO	BULAN	Jumlah Pengunjung Web http://diskominfo.riau.go.id
1	JANUARI	1653
2	FEBRUARI	10182
3	MARET	2643
4	APRIL	2240
5	MEI	2155
6	JUNI	1881
7	JULI	1398
8	AGUSTUS	2108
9	SEPTEMBER	2309
10	OKTOBER	2331
11	NOPEMBER	1544
12	DESEMBER	1441
TOTAL		31885



REKAPITULASI PENGUNJUNG WEBSITE TAHUN 2016
<http://mediacenter.riau.go.id>

No	Bulan	Jumlah Pengunjung Web <u>http://mediacenter.riau.go.id</u>
1	Januari	26563
2	Februari	25524
3	Maret	28226
4	April	28274
5	Mei	27911
6	Juni	26441
7	Juli	16417
8	Agustus	21317
9	September	18405
10	Oktober	20489
11	Nopember	17081
12	Desember	16903
Total		273551



3) Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan internet yang dikelola

Diskominfo Provinsi Riau

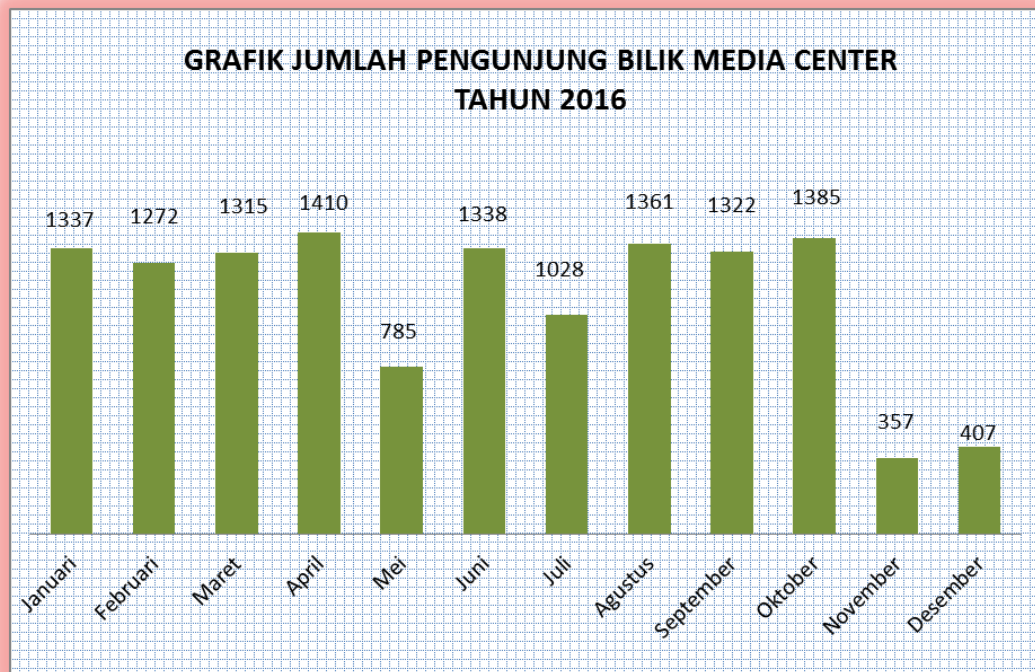
Target : 35.000 orang

Realisasi : 13.317 orang

Capaian realisasi jumlah pengunjung bilik media center hanya 38% dari target, ini disebabkan karena adanya perpindahan lokasi bilik media center di Lantai 1 Biro Humas dan juga sering putusnya jaringan internet di bilik media center Puswil Soeman HS.

**REKAPITULASI PENGUNJUNG BILIK MEDIA CENTER
SOEMAN HS DAN BIRO HUMAS LT.I
TAHUN 2016**

No	Bulan	Jumlah Pengunjung Bilik Media Center
1	Januari	1337
2	Februari	1272
3	Maret	1315
4	April	1410
5	Mei	785
6	Juni	1338
7	Juli	1028
8	Agustus	1361
9	September	1322
10	Oktober	1385
11	Nopember	357
12	Desember	407
Total		13317



PENGUKURAN KINERJA

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU
 Tahun Anggaran : 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Nilai e-government Provinsi Riau	2,6	0 (Tidak ada pemeringkatan)	0 %
	Sub indikator :			
	- Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terhubung pada SKPD Pemprov Riau	51 jaringan	51 jaringan	100%
	- Jumlah SKPD yang menerapkan e-government secara terintegrasi, aman dan handal	35 SKPD	43 SKPD	122,8%
	Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau	42,91	34,13	79,54%
	Sub indikator :			
	- Persentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau pada SDDKD	26,19%	27,77%	106%
	- Jumlah Pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau	280.000 orang	575.372 Orang	205%
	- Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan internet yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau	35.000 orang	13.317 orang	38%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib Komunikasi Informatika. Lebih lanjut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau tahun 2016 yang telah ditetapkan, dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam APBD, baik yang dialokasikan pada anggaran Belanja Langsung maupun anggaran Belanja Tidak Langsung.

Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Propinsi Riau Tahun 2016 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp. 54.085.705.210,- (lima puluh empat milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 45.770.055.246,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), uraian ringkas serta realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Realisasi penyerapan APBD Dinas Kominfo Provinsi Riau Tahun 2016

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH DANA (RP.)	REALISASI	
			KEUANGAN (RP.)	FISIK (%)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.564.227.286,-	8.314.958.751,-	100
5.2	BELANJA LANGSUNG	43.521.477.924,-	37.455.096.495,-	98,4
	JUMLAH	54.085.705.210,-	19.320.418.015,-	97,42

Realisasi Fisik Belanja Tidak Langsung sebesar 100 % dan Belanja Langsung sebesar 98,4 %. Sedangkan realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.314.958.751,- (delapan milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) atau 78,71%. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.249.268.535,- (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Hal ini disebabkan sisa kelebihan penganggaran (accress).

Realisasi Keuangan Belanja Langsung sebesar Rp. 37.455.096.495,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.066.381.429,- (enam milyar enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah. Sisa anggaran tersebut pada umumnya

merupakan sisa pagu pelelangan untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada beberapa kegiatan dan sisa perjalanan dinas luar daerah. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan terlaksana dengan baik.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Riau tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran-7.

DISKOMINFO RIAU

Secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun pertama berdirinya, dapat dikatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau sudah menunjukkan kemajuan dalam menyelenggarakan bidang Komunikasi dan Informatika. Namun masih belum bisa dikatakan berhasil, karena keberhasilan tersebut dinilai dari indikator-indikator kinerja yang harusnya dipelajari dengan cermat dan dijadikan tolok ukur penilaian keberhasilan / kegagalan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.

Terhadap pencapaian target dari berbagai indikator yang telah dicapai Dinas Kominfo Provinsi Riau langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah:

1. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau untuk meningkatkan nilai e-government Provinsi Riau dan nilai keterbukaan informasi publik Provinsi Riau.
2. Bidang/UPT yang bertanggungjawab pada Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar nilai Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Riau meningkat dari tahun sebelumnya.

3. Untuk nilai keterbukaan informasi publik, dapat merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi badan Publik.
4. Selama ini untuk Penilaian Kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau menggunakan penilaian yang dilakukan pihak lain, sehingga menyulitkan dalam melakukan penilaian kinerja setiap tahunnya. Ke depannya Dinas Kominfo agar membangun sendiri indikator kinerja.

Berikut beberapa keuntungan jika penilaian dikoordinir sendiri oleh Diskominfo Provinsi Riau :

- Dinas Kominfo dapat menunjuk rekanan (pihak ke 3) yang memang profesional dalam penilaian, selain itu untuk menjaga independensi penilaian agar tidak diintervensi oleh pihak internal SKPD.
- Indikator dapat diukur secara berkala, misal per bulan, triwulan atau pun semester. Karena selama ini, nilai yang didapat dari instansi lain baru diperoleh di akhir tahun anggaran sehingga sulit mengukur kinerja SKPD untuk semester, triwulan apalagi bulanan.
- Dinas Kominfo bisa menjelaskan secara rinci step by step penilaian termasuk rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan, sebab jika nilai yang diperoleh dari pihak luar hanya menyajikan nilai akhir, kalau pun ada hanya nilai per tahapan dan nilai akhir saja. Tidak dijelaskan secara rinci rumus dan pengolahan data yang digunakan karena hal

tersebut merupakan rahasia dan tidak bisa dibagikan ke pihak lain. Dan secara etika, Dinas Kominfo sebagai SKPD yang dinilai juga tidak bisa memaksa tim Penilai untuk memberi data yang dimaksud. Padahal hal tersebut perlu disajikan di buku Laporan Kinerja Dinas Kominfo agar nilai akuntabilitas Diskominfo menjadi lebih baik lagi.

Demikian hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2016. Pada dasarnya Dinas Kominfo Provinsi Riau sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Semoga ke depannya Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau semakin lebih baik.

TABEL RENCANA STRATEGIS DINAS KOMINFO PROVINSI RIAU 2014 - 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
Terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indikator 1 : Nilai e-government Provinsi Riau Sub Indikator :	2,3	2,45	2,6	2,65	2,75
		- Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpasang	0	51 titik	51 titik	51 titik	51 titik
		- Jumlah SKPD yang menerapkan e-government secara terintegrasi, aman dan handal	6 SKPD	30 SKPD	35 SKPD	42 SKPD	51 SKPD
		Indikator 2: Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau Sub Indikator :	35,82	39,36	42,91	44,5	46.45
		- Persentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau pada SDDKD	0	0	26,19 %	26,98%	27,66%

Lampiran-1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
		- Jumlah Pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau	230.000 orang	260.000 orang	280.000 Orang	300.000 Orang	320.000 Orang
		- Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan internet yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau	0	0	35.000 orang	40.000 orang	45.000 orang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR	ALASAN/SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas	1.	Nilai e-government Provinsi	Kementerian Kominfo RI
	pelayanan publik berbasis		Riau	
	teknologi informasi			
		2.	Nilai Keterbukaan Informasi	Komisi Informasi Pusat
			Provinsi Riau	

Pekanbaru, Januari 2016

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Riau,



I. H. YOGI GETRI

Pembina Tk. I

NIP. 19650916 199303 1 002

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ROVINSI RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya ketersediaan	1.	Nilai e-government Provinsi	2.60
	teknologi informasi yang		Riau	
	terintegrasi dalam pelayanan		sub indikator :	
	publik	1.a	Jumlah jaringan komunikasi dan	51 Jaringan
			informatika yang terpasang	
		1.b	Jumlah SKPD yang menerapkan	35 SKPD
			e-government secara terintegrasi,	
			aman dan handal	
		2.	Nilai Keterbukaan Informasi	42.91
			Provinsi Riau	
			sub indikator :	
		2.a	Persentase keterisian data	26,19%
			pembangunan Provinsi Riau pada	
			SDDKD	
		2.b	Jumlah Pengunjung website resmi	280.000 orang
			dan media online yang dikelola	
			Diskominfo Provinsi Riau	
		2.c	Jumlah masyarakat yang	35.000 orang
			memanfaatkan layanan internet	
			yang dikelola Diskominfo Provinsi	
			Riau	

Pekanbaru, Januari 2016

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Riau,



Ir. H. YOGI GETRI

Pembina Tk. I

NIP. 19650916 199303 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Nilai e-government Provinsi Riau	2,6
		sub indikator :	
		Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpasang	51 jaringan
		Jumlah SKPD yang menerapkan e-government secara terintegrasi, aman dan handal	35 SKPD
		Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau	42,91
		sub indikator :	
		Persentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau pada SDDKD	26,19%
		Jumlah Pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau	280.000 orang
		Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan internet yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau	35.000 orang
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal SKPD	Persentase Peningkatan Kinerja dan Layanan Internal SKPD	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp. 2.750.312.621,-	
2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp. 947.066.779,-	
3. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Rp.16.866.569.950,-	

4. Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Rp. 5.915.594.951,-
5. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 10.207.036.373,-
6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp. 674.516.900,-
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.975.387.400,-
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.495.410.000,-
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.188.500.000,-
10. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 421.478.900,-
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 745.065.000,-

G U B E R N U R R I A U

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Pekanbaru, November 2016
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI RIAU,



IR. H. YOGI GETRI

Petunjuk Pengisian :

- 1) Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- 2) Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Rencana Strategis SKPD atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama atau Indikator lain dari SKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut;
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, proporsi sumber dana (APBD, APBN dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.



Lampiran 5

INDIKATOR MENGUMUMKAN						
Indikator ini memiliki bobot nilai 25%						
Berikan tanda "X" pada salah satu kolom jawaban dengan kriteria sebagai berikut: LENGKAP = Apabila Jawaban Sdr memenuhi 50% + 1 dari Indikator Lengkap LENGKAP SEBAGIAN = Apabila Jawaban Sdr memenuhi 20% s/d 50% dari Indikator Lengkap TIDAK LENGKAP = Apabila Jawaban Sdr memenuhi kurang dari 20% dari Indikator Lengkap "Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"						
No.	Pertanyaan	Indikator Lengkap	Jawaban			Keterangan Data Dukung
			Lengkap (50%+1)	Lengkap Sebagian (20% s/d 50%)	Tidak Lengkap (< 20%)	"Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan"
1	2	3	4	5	6	7
1	Informasi yang Berkaitan dengan Profil Badan Publik					
a	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi terkait alamat lengkap Badan Publik?	Yang dimaksud lengkap terdiri atas: 1. nama jalan, 2. nomor, 3. kota/kab, 4. provinsi, 5. kode pos, dan 6. no.tlp/fax 7. alamat email/webmail	X			www.riau.go.id
						Softfile : (contoh: foto papan nama Komisi Informasi Pusat.jpg, foto booklet/flyer.pdf)
b	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi terkait visi-misi Badan Publik?	Yang dimaksud lengkap terdiri atas: 1. visi, dan 2. misi yang memuat ruang lingkup kegiatan, maksud, dan tujuan dari Badan Publik.	X			www.riau.go.id
						Softfile :
c	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik?	Yang dimaksud lengkap terdiri dari adanya 1. tugas dan 2.fungsi Badan Publik	X			www.riau.go.id
						Softfile :



KOMISI INFORMASI PUSAT

1	2	3	4	5	6	7
d	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi terkait struktur organisasi Badan Publik?	Yang dimaksud lengkap memuat: struktur dari pimpinan tertinggi Badan Publik sampai dengan 3 level ke bawah (levelnya dihitung dari pimpinan tertinggi).	X			www.riau.go.id Softfile :
e	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi terkait tugas, fungsi, dan alamat lengkap satuan kerja atau kantor unit Badan Publik?	Yang dimaksud lengkap memuat 1. tugas, 2. fungsi 3. nama jalan, 4. nomor, 5. kota/kab, 6. provinsi, 7. kode pos, dan 8. no.tlp/fax 9. alamat email/webmail satuan kerja atau kantor unit Badan Publik.		X		www.riau.go.id Softfile :
2	Informasi yang Berkaitan dengan Profil Pimpinan Badan Publik					
a	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi terkait profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik tiga level ke bawah?	Yang dimaksud lengkap memuat: 1.nama, 2. jabatan, 3. nomor telepon unit kerja, 4. alamat unit/satker pejabat, 5. latar belakang pendidikan, dan 6.penghargaan yang pernah diterima.			X	Situs/Portal : Softfile :
b	Apakah Pimpinan Badan Publik Sdr hingga 3 level ke bawah telah mengumumkan LHKPN/LHKASN pada periode tahun 2015?	Yang dimaksud lengkap adalah mulai dari pimpinan tertinggi hingga 3 level ke bawah.			X	Situs/Portal : Softfile :
3	Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik					
a	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang program/kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik di Tahun 2016?	Yang dimaksud lengkap terdiri dari : 1.nama program/kegiatan, 2. penanggung jawab / pelaksana program, 3. jadwal kegiatan/program, 4. target capaian, dan 5.anggaran.	X			www.riau.go.id Softfile :



KOMISI INFORMASI PUSAT

1	2	3	4	5	6	7
b	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang agenda terkait pelaksanaan tugas Badan Publik Tahun 2016?	Yang dimaksud lengkap adalah memuat agenda kegiatan yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan ke belakang sampai dengan 1 bulan ke depan di Tahun 2016.		X		www.riau.go.id Softfile :
c	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi layanan terkait hak-hak masyarakat Tahun 2016 ?	Yang dimaksud lengkap memuat: 1. jenis layanan yang Badan Publik Sdr berikan kepada masyarakat dan 2. tata cara layanan		X		www.riau.go.id Softfile :
d	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang penerimaan calon pegawai? (tahun penerimaan terakhir)	Yang dimaksud lengkap terdiri dari: 1.tahun penerimaan, 2.kuota, 3.formasi jabatan dan 4.jadwal tahapan, 5. Daftar Nama Calon Pegawai yang lulus seleksi			X	Situs/Portal : Softfile :
e	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015?	Yang dimaksud lengkap memuat: 1.rencana dan capaian kinerja Badan Publik , 2.dukungan SDM serta 3.realisasi anggaran tahun 2015.	X			www.riau.go.id Softfile :
4	Informasi Mengenai Keuangan Badan Publik					
a	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi laporan keuangan Badan Publik Tahun 2015?	Yang dimaksud lengkap memuat: 1.laporan realisasi anggaran Tahun 2015, 2.neraca keuangan Badan Publik Tahun 2015, 3.laporan arus kas dan catatan laporan keuangan Tahun 2015, dan 4.daftar aset dan investasi Tahun 2015.		X		www.riau.go.id Softfile :



KOMISI INFORMASI PUSAT

1	2	3	4	5	6	7
b	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016?	Yang dimaksud lengkap memuat: 1.nama kegiatan dan 2. jumlah anggaran.		X		www.riau.go.id
						Softfile :
5	Informasi mengenai Laporan Akses Informasi Badan Publik					
	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan ringkasan permohonan & keberatan informasi publik tahun 2015?	Yang dimaksud lengkap adalah laporan yang memuat: 1.jumlah permohonan informasi publik yang diterima, 2.waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, 3.jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, dan 4.alasan penolakan permohonan informasi publik.			X	Situs/Portal :
						Softfile :
6	Informasi mengenai Laporan mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Publik Badan Publik					
	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Publik?	Yang dimaksud lengkap terdiri dari: 1.informasi mengenai tata cara memperoleh informasi publik, 2.tata cara mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik, dan 3.upaya atas tidak ditanggapinya/tidak puasny jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik.	X			www.riau.go.id
						Softfile :
7	Informasi mengenai Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran di Badan Publik					
	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat Badan Publik?	Yang dimaksud lengkap memuat: 1. Alur/ skema pengaduan (tata cara) / 2.form/lembar isian pengaduan, dan 3. kontak pengaduan ke pejabat yang berwenang menerima pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat Badan Publik.			X	Situs/Portal :
						Softfile :



KOMISI INFORMASI PUSAT

1	2	3	4	5	6	7
8	Informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Badan Publik					
	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang pengadaan barang dan jasa Badan Publik tahun 2016?	Yang dimaksud lengkap memuat: 1.nama lelang, 2.tanggal pembuatan, 3. lingkup pekerjaan, 4. tahap lelang saat ini, 5. satuan kerja, 6. kategori, 7. Metode Pengadaan. 8. Metode dokumen, 9. Tahun anggaran, 10. Nilai Pagu Paket dan HPS 11. Jenis Kontrak, 12. Lokasi Pekerjaan 13. Syarat Kualifikasi dan 14. Peserta Lelang.	X			www.lpse.riau.go.id Softfile :
9	Informasi mengenai Regulasi Badan Publik					
	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi mengenai Regulasi yang sedang diproses dan regulasi yang telah disahkan/ditetapkan oleh Badan Publik Sdr?	Yang dimaksud lengkap terdiri dari: 1.daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ditetapkan oleh Badan Publik dan 2.daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Publik Sdr.			X	Situs/Portal : Softfile :
INDIKATOR MENYEDIAKAN Indikator ini memiliki bobot nilai 20%						
No.	Pertanyaan	Indikator Lengkap	Jawaban			Keterangan Data Dukung
			Lengkap (50%+1)	Lengkap Sebagian (20% s/d 50%)	Tidak Lengkap (< 20%)	"Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan"
10	Informasi mengenai Daftar Informasi Publik Badan Publik					
	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) yang berada dibawah penguasaan Badan Publik?	yang dimaksud lengkap memuat: 1.ringkasan isi informasi, 2.pejabat/unit kerja yang menguasai informasi, 3.penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, 4.waktu dan tempat pembuatan informasi, 5.bentuk informasi yang tersedia, 6.jangka waktu penyimpanan/retensi waktu, 7.tanda tangan PPID dan 8.terdapat bukti pemuktahiran dari pimpinan masing-masing unit/satker.			X	Situs/Portal : Softfile :



KOMISI INFORMASI PUSAT

1	2	3	4	5	6	7
11	Informasi mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Badan Publik					
a	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Publik Sdr?	Yang dimaksud lengkap adalah menyediakan dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan/disahkan oleh Badan Publik Sdr dalam rentang waktu 5 tahun yakni tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. (bagi Badan Publik yang keberadaannya setelah tahun 2010 dapat menyesuaikan)			X	Situs/Portal : Softfile :
b		Yang dimaksud lengkap meliputi: 1.naskah akademis/kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, 2.masukan dari berbagai pihak, 3.risalah rapat, rancangan peraturan, dan 4.tahap perumusan peraturan.			X	Situs/Portal : Softfile :
12	Informasi mengenai Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Badan Publik					
a	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen tentang <i>Memorandum of Understanding/ LoI/ Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama/sejenisnya</i> berikut dokumen pendukungnya dalam rentang waktu 5 tahun yakni tahun 2012 sampai dengan tahun 2016? (bagi Badan Publik yang keberadaannya setelah tahun 2010 untuk disesuaikan).	Yang dimaksud lengkap adalah memuat: 1.para pihak, 2.judul perjanjian, 3.ruang lingkup perjanjian, 4.hak dan kewajiban para pihak, 5.jangka waktu perjanjian, 6.tentang pembiayaan, dan 7.hasil rapat-rapat terkait.			X	Situs/Portal : Softfile :



KOMISI INFORMASI PUSAT

1	2	3	4	5	6	7
b	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya dalam rentang waktu 5 tahun yakni tahun 2012 sampai dengan tahun 2016? (bagi Badan Publik yang keberadaannya setelah tahun 2010 untuk disesuaikan).	Lengkap memuat: 1.para pihak, 2.judul perjanjian, 3.ruang lingkup perjanjian, 4.hak dan kewajiban para pihak, 5.jangka waktu perjanjian, 6.tentang pembiayaan, dan 7.hasil rapat-rapat terkait.			X	Situs/Portal :
						Softfile :
13	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Badan Publik					
a	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi mengenai pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil, dan keuangan?	Yang dimaksud lengkap tersedianya dokumen tentang regulasi/kebijakan Badan Publik mengenai 1. pedoman pengelolaan organisasi, 2. pedoman pengelolaan administrasi, 3. pedoman personil, dan 4. pedoman keuangan.			X	Situs/Portal :
						Softfile :
b	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan profil lengkap pimpinan dan pegawai?	Yang dimaksud lengkap memuat: 1.nama, 2.sejarah karir atau posisi, 3.sejarah pendidikan, 4.penghargaan, dan 5.sanksi berat yang pernah diterima.			X	Situs/Portal :
						Softfile :
c	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi mengenai anggaran secara umum dan laporan keuangan Badan Publik termasuk unit pelaksana teknis tahun 2015?	Yang dimaksud lengkap tersedianya 1.dokumen anggaran secara umum dan 2. dokumen laporan keuangan.			X	Situs/Portal :
						Softfile :
d	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tahun 2015 atau tahun terakhir?	Yang dimaksud dengan lengkap tersedianya dokumen data statistik mengenai: 1. organisasi, 2. administrasi, 3. kepegawaian, dan 4. keuangan.			X	Situs/Portal :
						Softfile :



KOMISI INFORMASI PUSAT

1	2	3	4	5	6	7
14	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya?	Yang dimaksud lengkap adalah tersedianya dokumen surat menyurat pimpinan Badan Publik Sdr dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. (bagi Badan Publik yang keberadaannya setelah tahun 2010 untuk disesuaikan).			X	Situs/Portal :
						Softfile :
15	Informasi mengenai Keuangan Badan Publik					
a	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen Laporan Keuangan Badan Publik yang telah diaudit dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016? (bagi Badan Publik yang keberadaannya setelah tahun 2010 untuk disesuaikan).	Yang dimaksud lengkap memuat: 1.laporan realisasi anggaran, 2. neraca keuangan, 3.laporan arus kas dan catatan laporan keuangan dan 4. Penjabaran Realisasi Anggaran.			X	Situs/Portal :
						Softfile :
b	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan laporan tentang data aset (Barang Milik Negara)?	Yang dimaksud lengkap adalah tersedianya dokumen data aset Badan Publik Sdr dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. (bagi Badan Publik yang keberadaannya setelah tahun 2010 untuk disesuaikan).			X	Situs/Portal :
						Softfile :
16	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik?	yang dimaksud lengkap adalah tersedianya: 1. rencana strategis Badan Publik yang masih berlaku, 2. rencana kerja Badan Publik tahun 2016.		X		www.riau.go.id
						Softfile :



KOMISI INFORMASI PUSAT

1	2	3	4	5	6	7
17	Informasi mengenai Pedoman Pelayanan Badan Publik					
a	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik berkaitan dengan pelayanan umum ?	Yang dimaksud lengkap tersedianya dokumen yang menyebutkan jenis layanan Badan Publik berikut dokumen SOP Pegawai Badan Publik untuk setiap jenis pelayanan umum .			X	Situs/Portal :
						Softfile :
b	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan pedoman pelayanan Informasi Publik ?	Yang dimaksud lengkap adalah tersedianya pedoman atau SOP bagi pegawai Badan Publik dalam melakukan pelayanan informasi publik, yang memuat: 1.informasi mengenai tata cara memperoleh informasi publik, 2.tata cara mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik, 3.tata cara upaya atas tidak ditanggapinya/tidak puasny jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik. 4. tata cara pengujian konsekuensi, 5. standar biaya penggandaan informasi publik, 6. akses komunikasi pelayanan informasi publik .			X	Situs/Portal :
						Softfile :
18	Informasi mengenai laporan pelayanan infomasi publik Badan Publik					
a	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik tahun 2015?	Yang dimaksud lengkap tersedianya dokumen laporan yang memuat: 1. sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, 2. sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, 3. anggaran layanan Informasi Publik, 4. laporan penggunaan anggaran.			X	Situs/Portal :
						Softfile :
b	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi laporan akses Informasi Publik Badan Publik Tahun 2015?	Yang dimaksud lengkap adalah laporan yang memuat: 1.jumlah permohonan informasi publik yang diterima, 2.waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, 3.jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, dan 4.alasan penolakan permohonan informasi publik.			X	Situs/Portal :
						Softfile :



KOMISI INFORMASI PUSAT

1	2	3	4	5	6	7
19	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja?	Yang dimaksud lengkap menyediakan dokumen 1. renstra dan 2. renja yang masih berlaku.		X		www.riau.go.id Softfile :
20	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik?	Yang dimaksud lengkap adalah menyediakan dokumen daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik Sdr dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. (bagi Badan Publik yang keberadaannya setelah tahun 2010 untuk disesuaikan).			X	Situs/Portal : Softfile :
21	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik?	Yang dimaksud lengkap adalah menyediakan dokumen hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik Sdr dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. (bagi Badan Publik yang keberadaannya setelah tahun 2010 untuk disesuaikan)			X	Situs/Portal : Softfile :
22	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat?	Yang dimaksud lengkap adalah 1.jumlah pelanggaran, 2. jenis pelanggaran, 3.gambaran umum, 4. penindakan atas pelanggaran.			X	Situs/Portal : Softfile :



KOMISI INFORMASI PUSAT

1	2	3	4	5	6	7
INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK						
Indikator ini memiliki bobot nilai 25%						
Data dukung verifikasi (dapat berupa foto atau screenshoot pada situs/portal)						
No.	Pertanyaan	Jawaban* (Isi salah satu)		Data Dukung Verifikasi		
		Ya	Tidak	(Dapat berupa foto atau screenshoot pada Situs/Portal)		
23	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan loket/ruang khusus layanan informasi					
a	Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (<i>desk information</i>)	X		Foto terlampir		
b	Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi	X		Form terlampir		
c	Formulir Keberatan	X		Form terlampir		
d	Daftar Register Permohonan	X		Form terlampir		
24	Apakah Badan Publik Sdr memberikan layanan informasi yang optimal?					
a	Dalam jangka waktu kurang dari batas waktu tanggapan atas permohonan informasi dan/atau tanggapan atas keberatan?	X		Contoh: Foto/dokumen laporan layanan informasi		
b.	Menginformasikan kebijakan yang berkaitan dengan standar pengenaan biaya penggandaan salinan informasi kepada Pemohon?		X	Contoh: Foto/dokumen standar biaya		
25	Apakah Badan Publik Sdr menyampaikan laporan akses layanan Informasi Publik tahun 2015 ke Komisi Informasi?	X				
26	Apakah Badan Publik Sdr mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik?					
a.	Akses layanan terhadap Informasi Publik	X		Contoh: Screenshoot kanal yang memuat informasi publik di Situs/Portal Badan Publik Sdr		
b.	Akses layanan terhadap Permohonan Informasi Publik					
b.1	email dan fax	X		diskominfo.riau.go.id (ppid online)		
b.2	Aplikasi Online	X		ppid.diskominfo.riau.go.id		
27	Apakah Badan Publik Sdr memiliki maklumat pelayanan informasi publik?		X	Contoh: Foto atau screenshoot maklumat pelayanan		



KOMISI INFORMASI PUSAT

1	2	3	4	5	6	7
INDIKATOR PENGELOLAAN & PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK						
Indikator ini memiliki bobot nilai 30 %						
No.	Pertanyaan	Jawaban* (Isi salah satu)		Data Dukung Verifikasi		
		Ya	Tidak	(Dapat berupa foto atau screenshoot pada Situs/Portal)		
28						
a.	Apakah Badan Publik Sdr telah menunjuk PPID yang tertuang dalam Peraturan/Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang?	X		SK terlampir		
b.	Apakah tugas dan fungsi PPID pada Badan Publik Sdr tertuang dalam bentuk Peraturan/Keputusan?	X		SK terlampir		
c.	Apakah Badan Publik Sdr telah memiliki struktur/bagan PPID yang tertuang dalam Peraturan/Keputusan?		X	Contoh: Bagan/Struktur PPID		
29	Apakah dalam melaksanakan tugas, PPID di Badan Publik Sdr dibantu oleh pejabat fungsional (Arsiparis/Pranata Humas/Pranata Komputer/Petugas yang khusus menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi) yang tertuang dalam Peraturan/Keputusan?		X	Contoh: SK atau surat penunjukkan penugasan		
30	Bagaimana pola koordinasi PPID dengan Satuan/Unit Kerja di Badan Publik Sdr?					
a.	Rapat koordinasi yang secara rutin terjadwal (Undangan, daftar hadir rapat, dan notulen rapat)		X	Contoh: Surat Undangan, Daftar Hadir & Notulen Rapat		
b	Surat menyurat (Dokumen surat dari PPID dan/atau dokumen surat dari satuan/unit kerja)		X	Contoh: Dokumen Surat dari PPID dan/atau dokumen surat dari satuan/unit kerja		
c	Bentuk komunikasi lainnya yang dapat dibuktikan (Sebutkan)		X	Sebutkan & lampirkan foto/screenshoot komunikasi tersebut		
31	Apakah Badan Publik Sdr telah melakukan tugas dan tanggung jawab dalam:					
a.	Pengujian konsekuensi? (Lampirkan dokumen SK Penetapan PPID mengenai Pengujian Konsekuensi)		X	Contoh: Dokumen SK Penetapan PPID mengenai Pengujian Konsekuensi		
b	Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik? (Lampirkan dokumen pertimbangan tertulis)		X	Contoh: Dokumen Pertimbangan Tertulis		



KOMISI INFORMASI PUSAT

1	2	3	4	5	6	7
32	Dalam bentuk apakah Badan Publik Sdr melakukan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik?					
a	Manual (Lampirkan foto bentuk penyimpanan dokumen misalnya folder, box file, ordner dll)		X		Foto terlampir	
b	Digital (Lampirkan foto bentuk penyimpanan dokumen misalnya keping cakram, micro film, encrypt dll)		X		Foto terlampir	



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Januari 2017

Nomor : 11 /KIP/J.II/I/2017
Lampiran : -
Hal : Informasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016.

Kepada Yth.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau

di

Pekanbaru.

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat Saudara Nomor 007/SP/Diskominfo.UP/XII/2016/113 perihal Permintaan Informasi Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau Tahun 2016, berikut disampaikan nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 pada Badan Publik Saudara. Semoga bermanfaat.

Nilai Verifikasi SAQ	Nilai Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)	Nilai Visitasi	Total
35,100	0 (tidak mengikuti VLA)	59	34,130

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KETUA,

JOHN FRESLY

Tembusan:
Gubernur Provinsi Riau

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau
s.d 30 Desember 2016

TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)	=	54,085,705,210	
REALISASI KEUANGAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)	=	45,770,055,246	84.63 %
REALISASI FISIK (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)	=	98.39 %	
TERTIMBANG	=	97.42 %	

BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI)			
REALISASI KEUANGAN (Rp.) / (%)	=	8,314,958,751	78.71 %
REALISASI FISIK (%)	=	100.00 %	
TERTIMBANG	=	100.00	

BELANJA LANGSUNG			
REALISASI KEUANGAN (Rp.) / (%)	=	37,455,096,495	86.06 %
REALISASI FISIK (%)	=	96.79 %	
TERTIMBANG	=	98.40	

NO.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Bobot (%)	Realisasi s/d Bulan			
				Keuangan		Fisik	
				Rp	%	(%)	Tertimbang
	BELANJA (TIDAK LANGSUNG DAN LANGSUNG)	54,085,705,210	100.00	45,770,055,246	84.63	98.39	97.42
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10,564,227,286	100.00	8,314,958,751	78.71	100.00	100.00
1	Gaji dan Tunjangan	5,801,679,500	54.92	4,095,814,834	70.60	100.00	54.92
2	Tambahan Penghasilan PNS	4,762,547,786	45.08	4,219,143,917	88.59	100.00	45.08
II	BELANJA LANGSUNG	43,521,477,924	100.00	37,455,096,495	86.06	96.79	98.40
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,975,387,400	4.54	1,560,976,509	79.02		4.54
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	9,750,000	0.02	6,300,000	64.62	93.04	0.02
1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	74,400,000	0.17	4,069,150	5.47	100.00	0.17
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	350,000,000	0.80	148,462,273	42.42	100.00	0.80
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	49,367,000	0.11	48,642,800	98.53	100.00	0.11
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	100,000,000	0.23	98,625,000	98.63	100.00	0.23
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	207,890,400	0.48	179,313,100	86.25	100.00	0.48
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	150,000,000	0.34	144,392,500	96.26	100.00	0.34
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	59,880,000	0.14	44,240,000	73.88	100.00	0.14
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	209,100,000	0.48	208,171,600	99.56	100.00	0.48
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	705,000,000	1.62	618,835,086	87.78	100.00	1.62
1.11	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	60,000,000	0.14	59,925,000	99.88	100.00	0.14
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,495,410,000	5.73	1,878,480,800	75.28		5.43
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0.00	-	0.00	0.00	0.00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	400,900,000	0.92	393,448,300	98.14	100.00	0.92
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	219,600,000	0.50	66,955,000	30.49	100.00	0.50
2.4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,874,910,000	4.31	1,418,077,500	75.63	93.04	4.01
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	188,500,000	0.43	172,498,000	91.51		0.43
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	97,500,000	0.22	90,805,000	93.13	100.00	0.22
3.2	Pengadaan Pakaian Korpri	0	0.00	-	0.00	0.00	0.00
3.3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0.00	-	0.00	0.00	0.00
3.4	Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya	0	0.00	-	0.00	0.00	0.00
3.5	Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya	91,000,000	0.21	81,693,000	89.77	100.00	0.21
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	745,065,000	2	487,560,400	65.44		1

NO.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Bobot (%)	Realisasi s/d Bulan			
				Keuangan		Fisik	
				Rp	%	(%)	Tertimbang
4.1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	225,000,000	0.52	10,000,000	4.44	4.44	0.02
4.2	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	270,065,000	0.62	262,616,000	97.24	100.00	0.62
4.3	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	250,000,000	0.57	214,944,400	85.98	100.00	0.57
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	472,178,900	1.08	406,138,400	86.01		1.07
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50,700,000	0.12	41,301,500	81.46	100.00	0.12
5.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	29,250,000	0.07	21,794,900	74.51	100.00	0.07
5.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	21,700,000	0.05	15,782,000	72.73	100.00	0.05
5.4	Penyusunan rencana kerja SKPD	59,916,900	0.14	49,479,800	82.58	100.00	0.14
5.5	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	269,000,000	0.62	250,859,900	93.26	100.00	0.62
5.6	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	0	0.00	-	0.00	0.00	0.00
5.7	Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD	41,612,000	0.10	26,920,300	64.69	83.06	0.08
6	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	2,313,777,921	5.32	1,791,244,169	77.42		5.11
6.1	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	157,713,250	0.36	135,302,372	85.79	100.00	0.36
6.2	Diseminasi Informasi ke Daerah Terisolir	127,964,375	0.29	117,736,200	92.01	100.00	0.29
6.3	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	220,969,300	0.51	151,012,100	68.34	100.00	0.51
6.4	Pembelajaran internet sehat dan CAKAP (Cerdas, Kreatif, Produktif) bagi masyarakat se Provinsi Riau	265,547,200	0.61	247,070,800	93.04	100.00	0.61
6.5	Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di 12 Kaupaten/Kota	564,000,000	1.30	437,486,997	77.57	96.63	1.25
6.6	Peningkatan Layanan Keskretariat dan Ajudikasi Komisi Informasi di Provinsi Riau	224,778,446	0.52	145,722,500	64.83	89.50	0.46
6.7	Pembinaan Media Center Daerah	106,061,900	0.24	94,486,000	89.09	100.00	0.24
6.8	Workshop Jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Journalist)	278,821,450	0.64	210,358,600	75.45	100.00	0.64
6.9	Pembelajaran Teknologi Informasi Bagi Masyarakat	128,656,000	0.30	123,548,400	96.03	100.00	0.30
6.10	Diseminasi Informasi Komunikasi Masyarakat	239,266,000	0.55	128,520,200	53.71	80.00	0.44
6.11	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Program Redesign KPU/KSO	0	0.00	-	0.00	0.00	0.00
7	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	947,066,779	2.18	759,494,700	80.19		2.18
7.1	Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi	458,359,899	1.05	303,581,950	66.23	100.00	1.05
7.2	Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal	488,706,880	1.12	455,912,750	93.29	100.00	1.12
8	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	16,866,569,950	38.75	15,478,291,715	91.77		38.65
8.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau	4,439,830,365	10.20	4,055,873,715	91.35	99.00	10.10
8.2	Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	3,295,500,000	7.57	3,240,414,800	98.33	100.00	7.57
8.3	Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Pedesaan	0	0.00	-	0.00	0.00	0.00
8.4	Pembangunan Command Centre Provinsi Riau	9,131,239,585	20.98	8,182,003,200	89.60	100.00	20.98
9	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	5,915,594,951	13.59	5,134,770,840	86.80		13.59
9.1	Pengembangan E-Government Provinsi Riau	4,574,286,181	10.51	4,051,510,800	88.57	100.00	10.51
9.2	Pembinaan,Evaluasi dan Pengendalian E-Goverment di SKPD Pemerintahan Provinsi Riau	316,957,000	0.73	268,388,240	84.68	100.00	0.73
9.3	Pembangunan Elektronik Data Informasi Pembangunan Provinsi Riau	728,351,770	1.67	609,396,300	83.67	100.00	1.67
9.4	Bimbingan Teknis Bagi Administrator Pengelola E-Goverment Pemerintah Provinsi Riau	296,000,000	0.68	205,475,500	69.42	100.00	0.68

NO.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Bobot (%)	Realisasi s/d Bulan			
				Keuangan		Fisik	
				Rp	%	(%)	Tertimbang
10	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	10,357,036,373	23.80	8,655,747,112	83.57		23.32
10.1	Pengelolaan website riau.go.id	3,312,478,625	7.61	2,657,340,700	80.22	100.00	7.61
10.2	Pengelolaan dan pengembangan website Dinas Kominfo Provinsi Riau	133,275,500	0.31	119,090,950	89.36	100.00	0.31
10.3	Layanan PPID Provinsi Riau dan Dinas Kominfo Provinsi Riau	623,126,000	1.43	564,269,490	90.55	100.00	1.43
10.4	Layanan Informasi melalui media center	197,826,310	0.45	184,347,150	93.19	100.00	0.45
10.5	Newsroom pemerintah provinsi riau	532,289,550	1.22	531,259,750	99.81	100.00	1.22
10.6	Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau	150,000,000	0.34	148,379,360	98.92	100.00	0.34
10.7	Partisipasi dalam Pekan Informasi Nasional	380,430,910	0.87	278,060,049	73.09	100.00	0.87
10.8	Peliputan Acara dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Riau	371,901,825	0.85	342,864,425	92.19	100.00	0.85
10.9	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	1,290,000,000	2.96	1,140,213,716	88.39	99.22	2.94
10.10	Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi /mediasi di luar pekanbaru	282,374,758	0.65	106,587,418	37.75	79.75	0.52
10.11	Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi Se Provinsi Riau	0	0.00	-	0.00	0.00	0.00
10.12	Layanan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Media elektronik dan Media Luar Ruangan	261,131,600	0.60	233,828,650	89.54	100.00	0.60
10.13	Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau	428,000,000	0.98	184,256,804	43.05	67.90	0.67
10.14	Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerja Sama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	337,081,700	0.77	266,346,250	79.02	99.28	0.77
10.15	Pengembangan Studio Editing Multimedia	739,705,700	1.70	713,240,900	96.42	100.00	1.70
10.16	Pengembangan Tv dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau	372,570,000	0.86	325,817,000	87.45	100.00	0.86
10.17	Penguatan Lembaga Penyiaran di Provinsi Riau	332,551,795	0.76	301,607,300	90.69	100.00	0.76
10.18	Penyediaan Layanan Taman Pintar	612,292,100	1.41	558,237,200	91.17	100.00	1.41
10.19	Peningkatan Aksesibilitas Layanan Internet Kepada Masyarakat Melalui Mobile Internet	0	0.00	-	0.00	0.00	0.00
11	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	674,516,900	1.55	627,192,400	92.98		1.55
11.1	Update dan analisa pembangunan Provinsi Riau	263,545,160	0.61	255,218,850	96.84	100.00	0.61
11.2	Identifikasi, sinkronisasi dan integrasi data dan informasi pembangunan pemerintah daerah se Provinsi Riau	162,839,150	0.37	147,305,600	90.46	100.00	0.37
11.3	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pembangunan dan Data spesial (Geografis) Bagi Aparatur Unit Kerja/Instansi Terkait Pemerintah Daerah Se Provinsi Riau	248,132,590	0.57	224,667,950	90.54	100.00	0.57
12.	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	570,373,750	1	502,701,450	88.14		1.31
12.1	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	185,593,800	0.43	171,475,300	92.39	100.00	0.43
12.2	Workshop Jasa Titipan dan Jasa Provider	173,033,150	0.40	143,849,350	83.13	100.00	0.40
12.3	Perlombaan dan Pameran Filateli	211,746,800	0.49	187,376,800	88.49	100.00	0.49

Pekanbaru, 30 Desember 2016
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI RIAU ,



Ir. H. YOGI GETRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199303 1 002